

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan analisa yang telah dilakukan, maka dapat diperoleh suatu kesimpulan dari permasalahan yang ada, antara lain:

1. Pemerintah memiliki peran dalam hal pembangunan, untuk itu pemerintah melaksanakan anggaran berbasis kinerja yang meliputi pengukuran kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dan masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja.
2. Kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Klaten dalam melaksanakan anggaran berbasis kinerja adalah adanya Kualitas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang belum optimal sehingga menyebabkan keterlambatan penyusunan APBD. Selain itu, keterlambatan penyusunan APBD memberikan dampak yang meresahkan masyarakat karena apabila

terlambat maka kegiatan pembangunan kabupaten terlambat, terlambat dana transfer ke desa, dan kemungkinan terlambatnya pembayaran gaji pegawai. Selanjutnya permasalahan yang mempengaruhi penerapan anggaran berbasis kinerja pada Pemerintah Kabupaten Klaten yakni keterbatasan sumber daya manusia (SDM), Keterbatasan kualitas sumber daya manusia mengakibatkan masih kurangnya pemahaman petugas perencanaan SKPD mengenai indikator kinerja sehingga indikator kinerja yang dirumuskan dalam dokumen pelaksanaan anggaran baru sebatas melanjutkan apa yang ada tahun sebelumnya tanpa melihat bagaimana kualitasnya.

3. Upaya untuk mengatasi kendala-kendala dalam permasalahan yang dihadapi dalam penerapan Tata Pemerintahan dalam melaksanakan Anggaran Berbasis Kinerja adalah menentukan indikator kinerja yang jelas agar kinerja dapat diukur dan diperbandingkan. Selain itu, diadakannya evaluasi kinerja yang efisien untuk melihat *output* dan *input* baik untuk rencana maupun realisasinya. Selanjutnya, melakukan penindakan yang tegas terhadap segala penyimpangan yang bertentangan dengan hukum dan kebijakan pemerintah dalam melaksanakan Anggaran Berbasis Kinerja sesuai dengan amanat Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1999 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

## B. SARAN

1. Harus adanya tindakan yang tegas dalam penyimpangan ataupun permasalahan pengelolaan keuangan, sebab permasalahan pengelolaan keuangan daerah dalam melaksanakan anggaran kinerja adalah permasalahan yang sangat riskan terjadi.
2. Harus adanya evaluasi mengenai sistem pengukuran kinerja agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan, dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/ kegiatan di masa yang akan datang.
3. Berdasarkan kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Klaten dalam melaksanakan anggaran berbasis kinerja, dapat diberikan saran sebagai berikut:
  - a. Perlu adanya penerapan Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 tahun 2005 dalam pengajuan anggaran.
  - b. Komunikasi antar Badan/Dinas/Kantor dalam memberikan layanan untuk merumuskan dan menyusun Standar Pelayanan Minimum (SPM).

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Syani, 2007, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Abdul Wahab, Solichin (2008), *Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Bastian, Indra, 2006, *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, Jakarta: Erlangga.
- Berry, David, 2003, *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Budiardjo, Miriam, 2003, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dwipayana, Ari AAGN, 2003, *Membangun Good Governance*, Jakarta: Raja Grafindo Pustaka.
- Halim, Abdul, 2007, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: Salemba Empat.
- Hermawan, Erry, 2011, *analisis penerapan sistem anggaran berbasis kinerja di lingkungan rumah tangga Kepresidenan Sekretariat Negara RI*, Magister Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- J. Dwi Narwoko & Bagong Suryant, 2006, *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana Media Group.
- Kurniawan, Agung, 2005, *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Pembaharuan.
- Labolo, Muhadam, 2007, *Memahami Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Kelapa Gading Permai.
- Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta.
- , 2009, *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- MD, Mahfud, 2010, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Mutiah, Andi Gafriana, 2008, *fungsi pengawasan DPRD dalam pengelolaan APBD guna mewujudkan pemerintahan yang baik di kota Makassar*, Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

- Ndraha, Taliziduhu, 2003, *Kybernology I (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rasyid, Ryaas, 2002, *Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*, Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widia.
- Renyowijoyo, Muindro, 2013, *Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Riddell, R, 2009, *Does Foreign Aid Work? WRR Scientific Council for Government Policy 21: 47–70*.
- R. Suyoto Bakir, 2009, *Kamus lengkap Bahasa Indonesia*, Tangerang: Karisma Publishing Group.
- Salam, Dharma Setyawan, 2004, *Manajemen Pemerintahan Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Sedarmayanti, 2007, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah: Upaya Membangu Organisasi Efektif dan Efisien Melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- \_\_\_\_\_, 2012, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Refika Aditama Eresco
- Sinambela, Lijan P, 2006, *Reformasi Pelayanan Publik*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Siregar, Baldric, 2015, *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual) Edisi Pertama*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Siregar, Muhammad Arifin, 2008, *penerapan tata pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pemerintahan Provinsi Bengkulu*, Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
- Soedarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana*, Bandung: Sinar Baru.
- Soekanto, Soerjono, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers.
- \_\_\_\_\_, 2012, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Solichin, Abdul Wahab, 2014, *Analisis Kebijakan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Suryaningrat, Bayu, 1992, *Mengenal Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: PT Rineka Cipta.

Thoha, Miftah, 2012, *Kepemimpinan Dalam Manajemen*, Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada.

Thomas, R. Dye, 1992, *Understanding Public Policy*, New Jersey: Englewood.

Tjandra, W. Riawan, 2009, *Peradilan Tata Usaha Negara: Mendorong Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

—————, 2014, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta: PT Gramedia.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

Negara RI, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Negara RI, UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 2003, 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286

Negara RI, UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 2014, 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5587

Negara RI, UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 2014, 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5601

Peraturan Pemerintah RI, Nomor 90 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 2010, 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5178

Peraturan Pemerintah RI, Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 2019, 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6322